

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdullah, I. (2003). *Sangkan Paran Gender*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Alfianika, N. (2015). *Buku Ajar Metode Pengajaran Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Deeppublish

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Bungin Burhan. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Bernard Raho, SVD. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisier.

Djoko Prakoso, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 43.

Djuyandi, Yusa. 2017. *Pengantar Ilmu Politik*, Edisi Kedua. Depok: Rajawali Pers.

Fakih, M. (2016). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*,. Yogyakarta: Insist Press.

Farzani, B. (2010). *Partisipasi Perempuan dalam Politik dan*

Pemerintahan. Jakarta: UNDP Indonesia.

H.T. Wilson (1989:2), *Sex and Gender, Making Cultural Sense of Civilization*, Leiden, Kobenhavn, Koln: E.J Brill.

Irawan Soejito, *Teknik Membuat Peraturan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 1.

Kaloh, J. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika

Kartono, Kartini, 1998. *Pemimpin Dan Kepemimpinan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Khairul Anwar, d. (2004). *Reposisi Perempuan Dalam Panggung Politik*. Pekanbaru: ISDP.

Labolo, M (2015). *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. PT Raja Grafindo: Jakarta

Mansour Fakih (2006: 71), *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, Hal. 71.

Mulia, S. M. (2005). *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Murniati, A. N. (2004). *Getar Gender Buku Pertama: Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Dan Hukum*. Magelang: Indonesia Terampil

Rasyidin, A. (2016). *Gender dan Politik Keterwakilan Wanita Dalam Politik*. Sulawesi: UNIMALPRESS.

Rauf, M. (2007). *Karakteristik Dunia Politik: Tantangan Bagi Kaum Perempuan*. Pekanbaru: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau bekerjasama dengan UNRI Press,.

Robbins, S. P, 1996. *Perilaku organisasi: Konsep, kontroversi, aplikasi*. Jakarta: Prenhallindo.

Robert K. Merton,1989 : *Analisa Fungsional (seri pengenalan sosiologi No. 10)* Jakarta: Rajawali

Siagian . P, Sondang, 1994. *Teori Dan Praktek kepemimpinan*, Rineka Cipta :Jakarta.

Sihite, R. (2007). *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syafiie, I. K. (2011). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suyatno. (2014). Sekolah Islam terpadu; Filsafat, ideologi, dan tren baru pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 355. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.22.355-377>

Jurnal dan Skripsi:

A. Michael Huberman, dan Matthew B. Miles. Analisis data kualitatif
Terj. Tjeep Rohidi. Jakarta : UI Press, 1992.

Afifudin (2012:131) "*Perencanaan Pengajaran dalam Proses Pembelajaran*". *Jurnal UIN-Alauddin*. Volume I Nomor 1.

Ana Maria Gadi Djou, L. (2018). "*Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak*". *Jurnal Hukum*, Vol,4(No,3).

Artina, D. (2016). , "*Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019*", , *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*,, Volume 23, (Nomor 1,), 123-141.

Argarini, Lally Nurhidayati. "*Feminisme Liberal (Teori)*" Iespedia, www.iespedia.com/blog/ (diakses tanggal 7 Juli 2019).

Evi Novida Ginting. (2011). , "*Representasi Perempuan di Parlemen Indonesia*". , *Jurnal POLITEIA*,, Volume 3,(Nomor2,), 114.

Eraisha Valensi (2015) Peran Bupati dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM Dalam Perencanaan dan Penggaran Responsif Gender (PPPG) Pada APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2011-2013

Faizal, L. (2016). "*Perempuan Dalam Politik (Kepemimpinan Perempuan Perspektif Al-Qur'an)*". *Jurnal TAPIs*, Vol 12,(No 1,), 93-110.

Firda Amalia (2017). Kepemimpinan Perempuan Dalam Jabatan

Publik Di Provinsi Banten (Studi Kasus Bupati Lebak Periode 2014-2019).

Indah Devitasari, 2017. Peran Anggota DPRD Perempuan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Tentang Pengarusutamaan Gender Di Sulawesi Selatan.

Jacobus, Adrianus. (2016). Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Manado: Universitas Samratulangi.

Putri, A. (2011). "Bayang- Bayang Afiriasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Indonesia". Jurnal Studi Politik, Volume 2,(Nomor 1,).

Nurrahmi MZ, A. S. (2017). "Perempuan dan Politik pada Rekrutmen Politik Calon Legislatif Perempuan di Partai Keadilan Sejahtera" , POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, Volume 9, (Nomor 2,), 93-110.

Rafni, A. (2013). "*Kesetaraan Gender Dalam Politik : Pembinaan Kader Perempuan Oleh Partai Politik, Upaya Menuju Penguatan Kapasitas Legislatif Daerah*". Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol 3,(No 2,), 145-171.

Safitri. 2008. Affirmative Action 30% Kouta Caleg Perempuan Sebuah Semboyan. Jurnal Psikologi Affirmative Action

Sakaria, S. N. (2015). *“Perempuan Dan Budaya Patriaki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)”*. Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume1,(Nomor 1,), 173-181.

Siregar, A. E. (2009). *“Transkip Diskusi Representasi Politik Perempuan: Sekadar Warna atau Turut Mewarnai?”*,. Jurnal Sosial Demokrasi, edisi 6,, 12.

Surbakti, Ramlan,.dkk. (2011). Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

Wahyudi, V. (2018). *“Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender”*. Jurnal Politik Islam, Vol,1(No,1), 82-85.

Wardani, Sri Budi Eko. 1999. Aspirasi Perempuan Anggota Parlemen terhadap Pemberdayaan Politik Perempuan (Jakarta: Penerbit Yayasan Jurnal Perempuan).

Sumber Lain:

Fardiansyah, A. (2019, Mei 04). Kaderisasi Perempuan Di Partai Politik Harus Dilandasi Ilmu Dan Wawasan. Retrieved November 14, 2019, from news.okezone.com.: (<https://news-okezone-com./kaderisasi-perempuan-di-partai-politik-harus-dilandasi-ilmu-dan-wawasan>)

Hidayah, S. N. (2018. , Agustus 20). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik. Retrieved November 14, Akses 2019. , from .m.detik.com.: (<https://m.detik.com/news/kolom/keterwakilan-perempuan-dalam-politik>)

Naskah Rancangan peraturan daerah kabupaten mamuju tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan

Priatmojo, D. (2019, September 18). Keterwakilan Perempuan di DPR Priode 2019-2024 Tak Capai 30 Persen. Retrieved November 14, 2019, from vivanews.com.: (<https://www-vivanews-com/keterwakilan-perempuan-di-DPR-Priode-2019-2024-Tak-Capai-30-Persen>)

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender

tribunnews.com. (2018, Agustus 14). 14 Bacaleg DPRD Kota Dumai Gagal Maju di Pemilu 2019. Retrieved Oktober 11 , 2019, from <https://www.tribunnews.com>: (<https://www.tribunnews.com/regional/2018/08/11/14-bacaleg-dprd-kota-dumai-gagal-maju-di-pemilu-2019>),)

<https://mediaindonesia.com/humaniora/476549/dorong-lebih-banyak-pemimpin-perempuan-yang-mampu-bawa-perubahan>

<https://mamujukab.bps.go.id/publication/2022/02/25/7c93b74c3c61421ee45cc1f7/kabupaten-mamuju-dalam-angka-2022.html>

Lampiran Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara langsung bersama Ibu Hj. St. Sutinah Suhardi, S.H., M.Si (Bupati Mamuju) Pada tanggal 26 April 2022 Pukul 13.30 WITA bertempat dikantor bupati mamuju



2. Wawancara langsung Bersama Ibu Herlina, S.P (Kepala Dinas Kantor Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Mamuju) Pada tanggal 13 April 2022 Pukul 09.10 WITA bertempat dikantor PPPA



- 3. Wawancara langsung bersama aktivis perempuan Ibu Hj. St. Suraidah Suhardi, S.E., M.Si (Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat) Pada tanggal 1 April 2022 Pukul 17.30 WITA Bertempat dikediaman beliau**



4. Wawancara langsung Bersama aktivis perempuan Kak Icha Aisyah (Anggota Resensi Residen) Pada tanggal 21 April 2022 Pukul 15.44 WITA bertempat diresensi coffe



- 5. Wawancara langsung Bersama salah satu Tokoh Masyarakat
Kab. Mamuju Ibu Sarinah, S.E Pada tanggal 18 April 2022 Pukul
21.10 WITA bertempat dikediaman beliau**



6. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten mamuju tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan

